



Kebijakan Fiskal:

Konteks Penganggaran Publik di Indonesia

Kuliah #8
Keuangan Publik

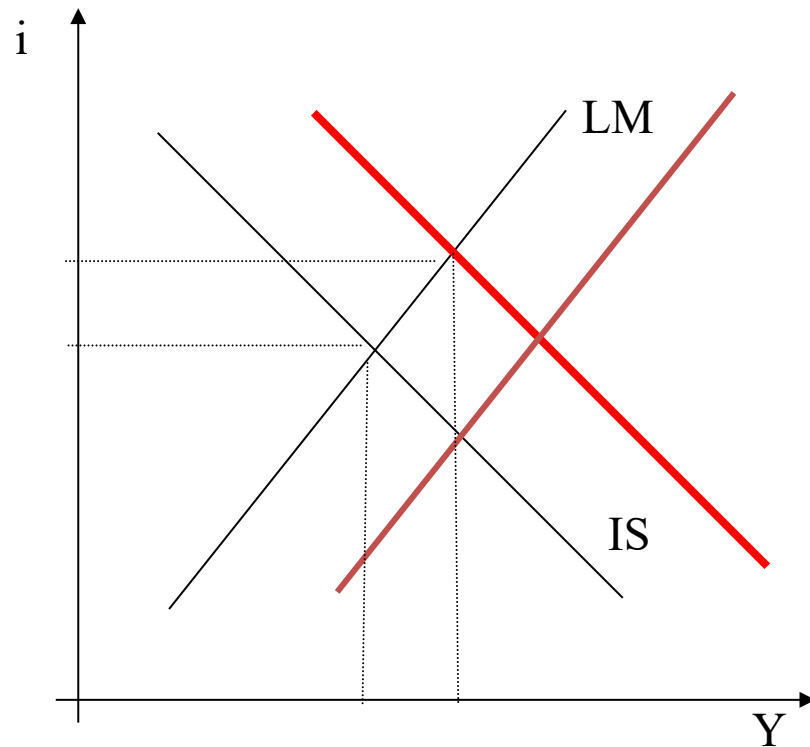
Wahyudi Kumorotomo, PhD
www.kumoro.staff.ugm.ac.id

2020



Kurva IS - LM

- Kebijakan Moneter: M , menggeser Kurva LM
- Kebijakan Fiskal: Fiscal T, G , menggeser Kurva IS.





Anggaran dan Belanja Pemerintah

- Fiscal policy is the use of taxes, government transfers, or government purchases of goods and services to shift the aggregate demand curve.
- Government **directly** controls one of the variables in GDP

$$\text{GDP} = C + I + G + (X - M)$$



Tolong Unduh Data Pendukung...

- www.kemenkeu.go.id
- <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/>
- <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef-nk-apbn.asp>
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=7132

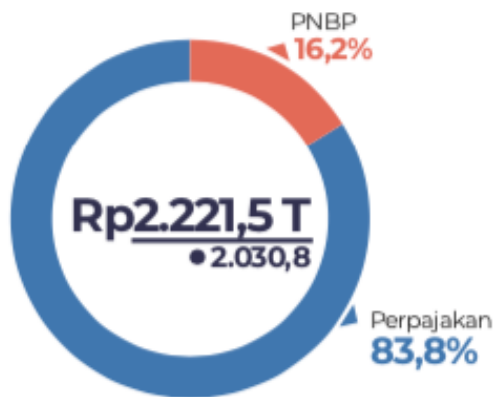


RAPBN 2020

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

RAPBN 2020 (Rp. trl) Outlook APBN 2019 (Rp. trl)

Pendapatan Negara



Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah

Perpajakan	■ 1.861,8
	● 1.643,1
PNBP	■ 359,3
	● 386,3

Belanja Negara

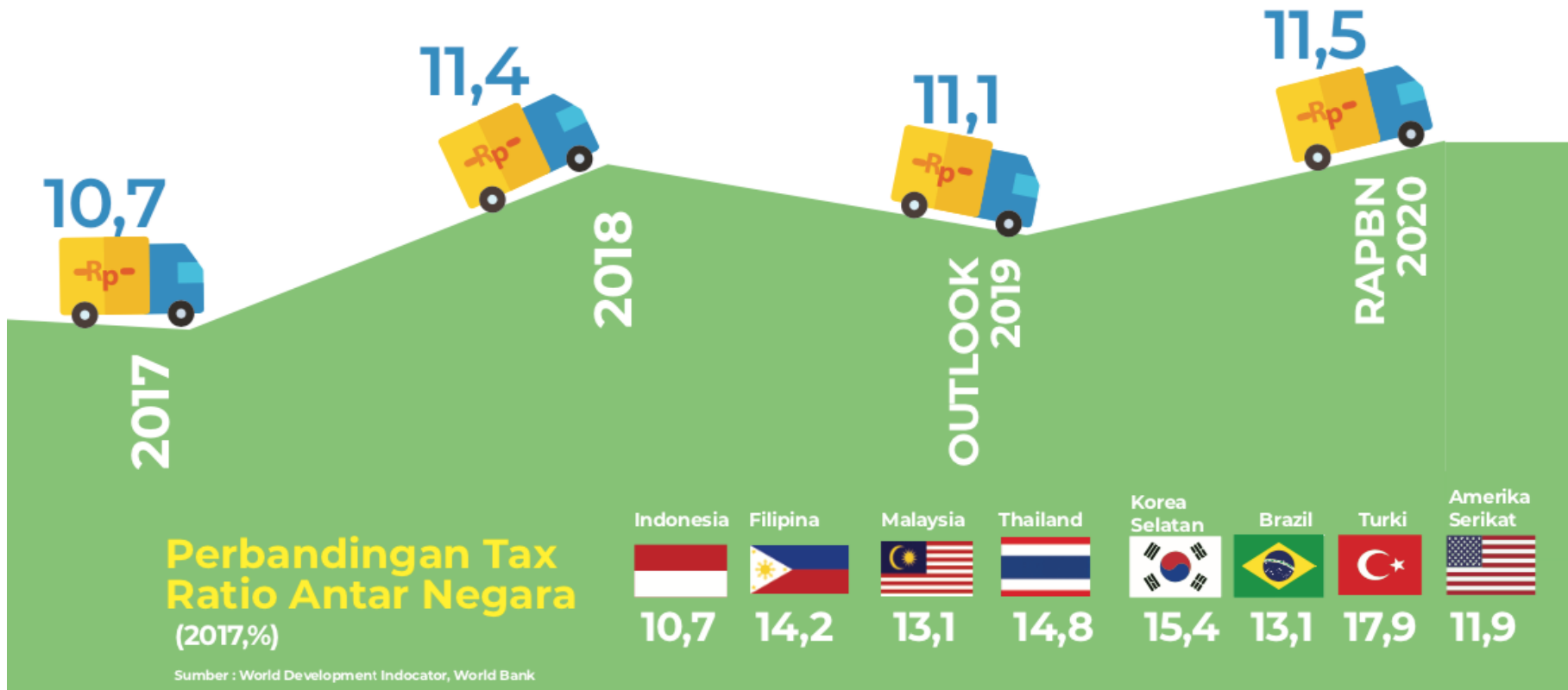


Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Belanja Pemerintah Pusat	■ 1.670,0
	● 1.527,2
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	■ 858,8
	● 814,4



Tax Ratio Indonesia Masih Rendah



Tax Ratio: $\Sigma \text{Tax} / \text{GDP}$



Tax Ratio and Tax Coverage

Tax Ratio: $\Sigma \text{Tax} / \text{GDP}$

Tax Coverage: Number of Registered Taxpayers / Number of Potential Taxpayers (households, actively working individuals).

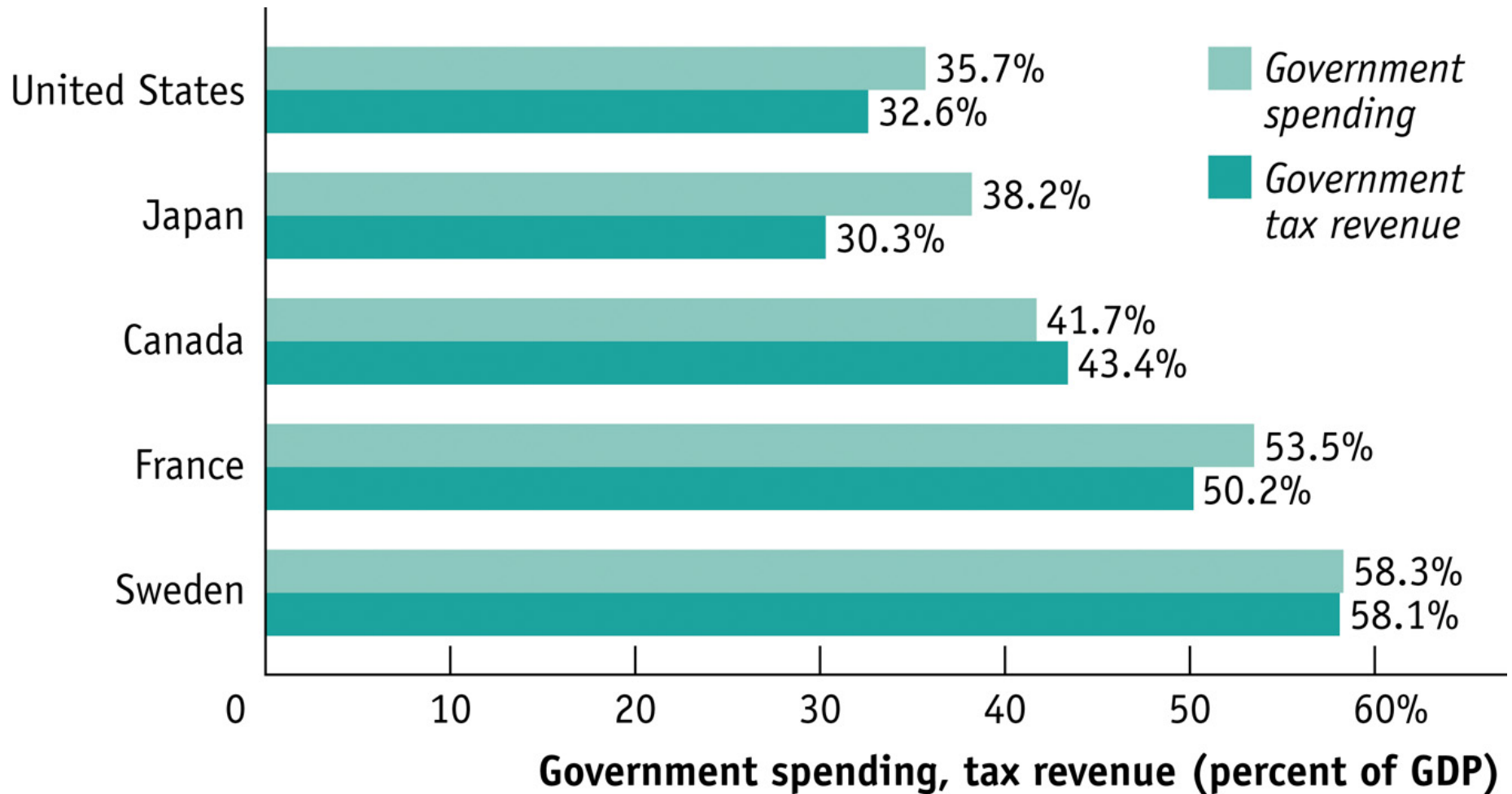
In 2015, the tax ratio was 11.6 percent.

In 2015, registered taxpayers (pemilik NPWP) was only 30,044,103 while the actively working individual was 93.72 million.

→ Tax Coverage: 32.06 percent.

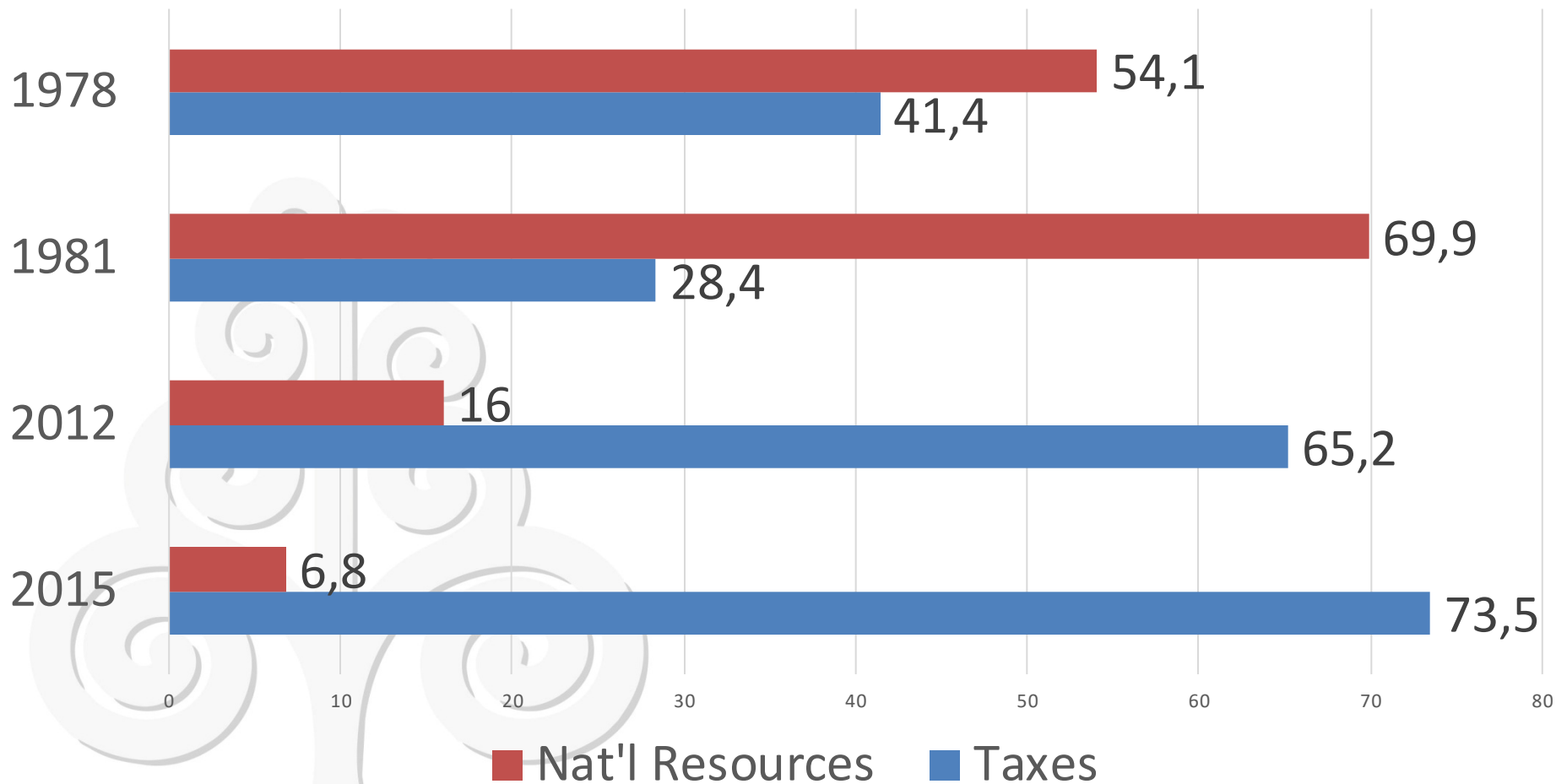


Kebijakan Fiskal di Negara Maju





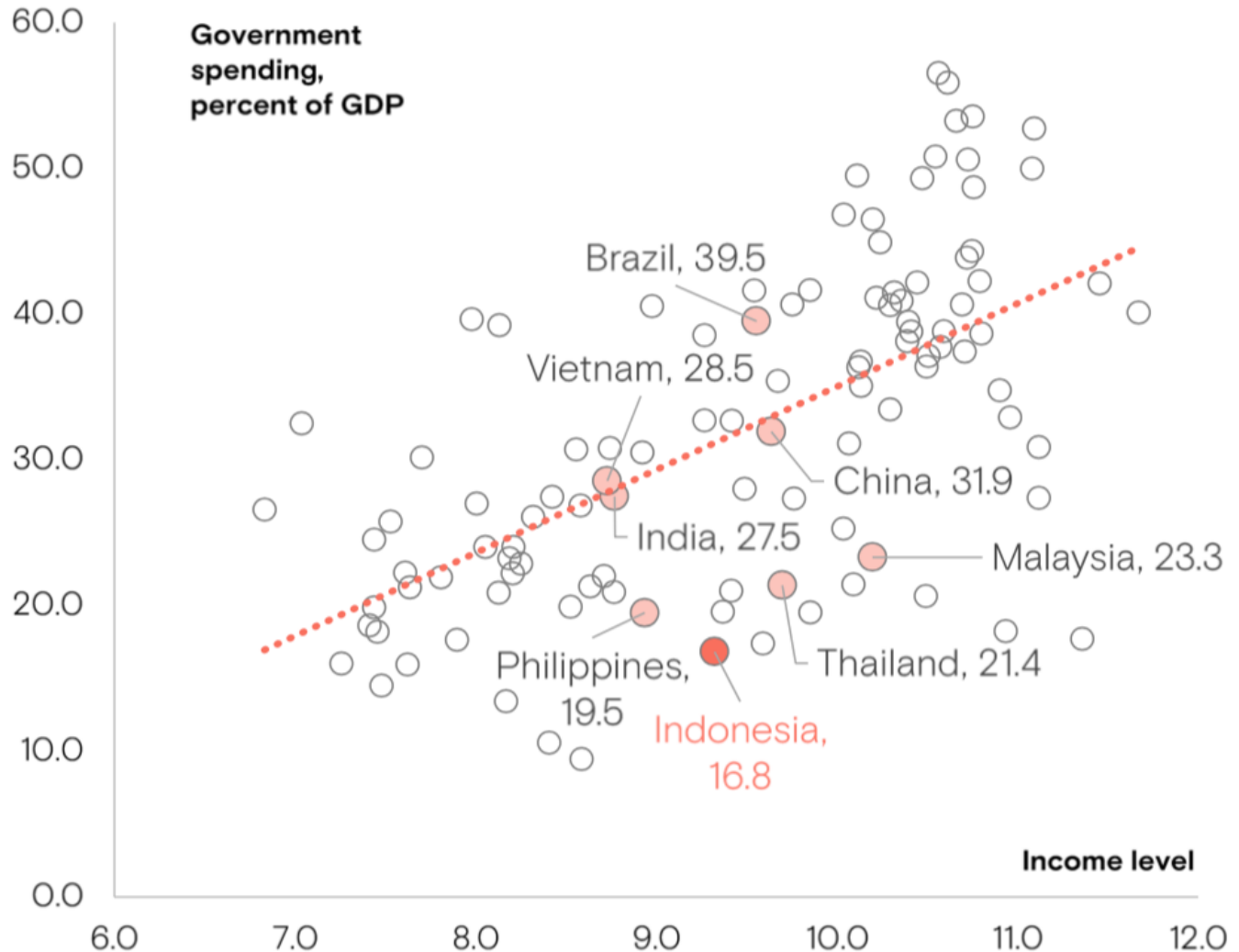
Pendapatan Negara Sebelum dan Setelah Kebijakan Reformasi Pajak (%)



Inefektivitas Keuangan Negara

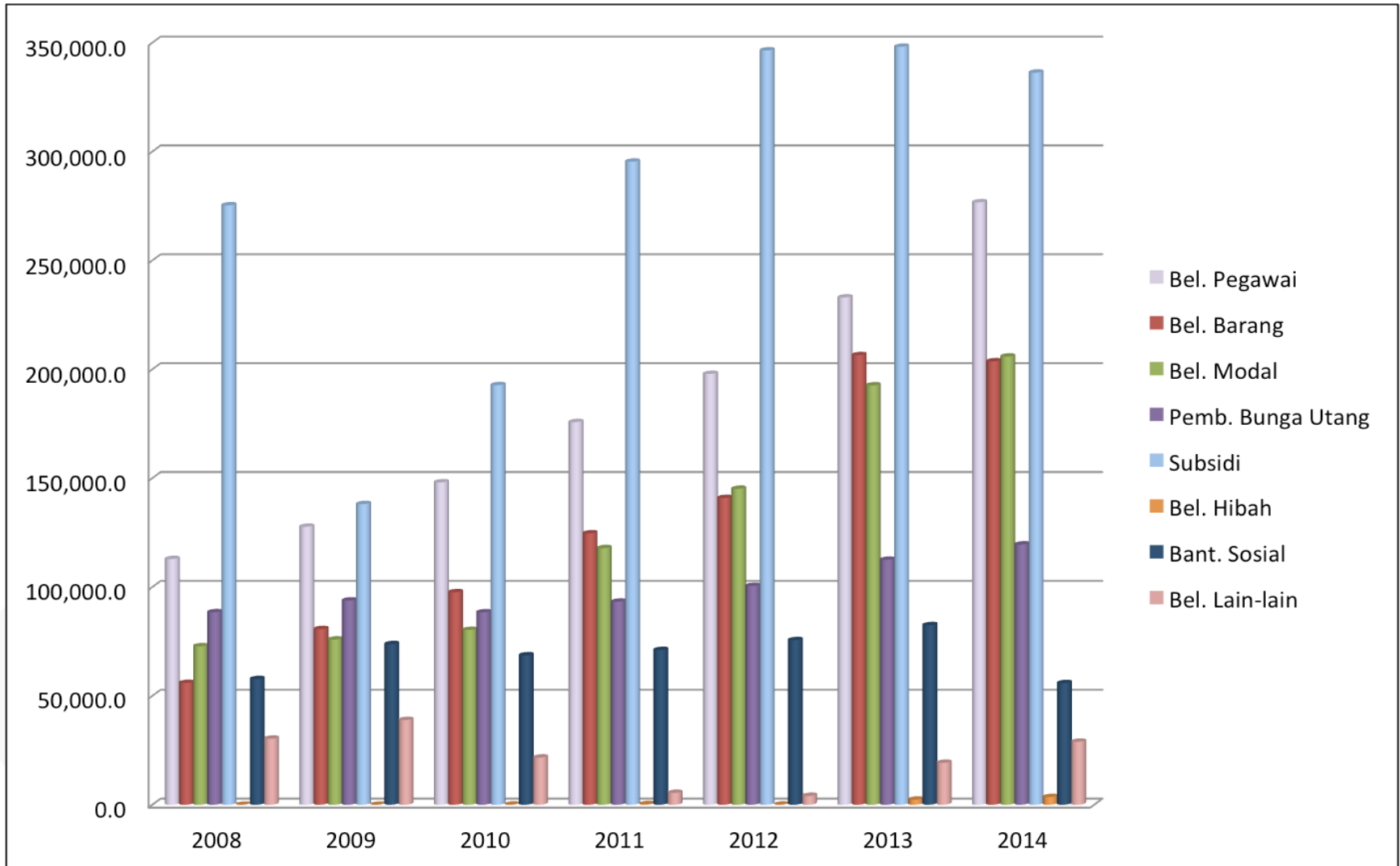


Revenue collection is currently **well below** Indonesia's peers – and the country's needs



Sumber: Development Policy Review, World Bank, 2019

Subsidi Energi dan Belanja Pegawai Selalu Paling Besar; Bgm Efektivitasnya?



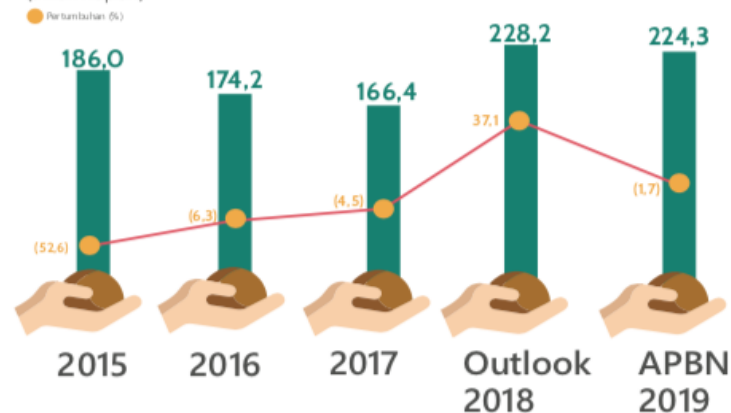
Sebagian besar subsidi untuk energi...



Kebijakan 2019

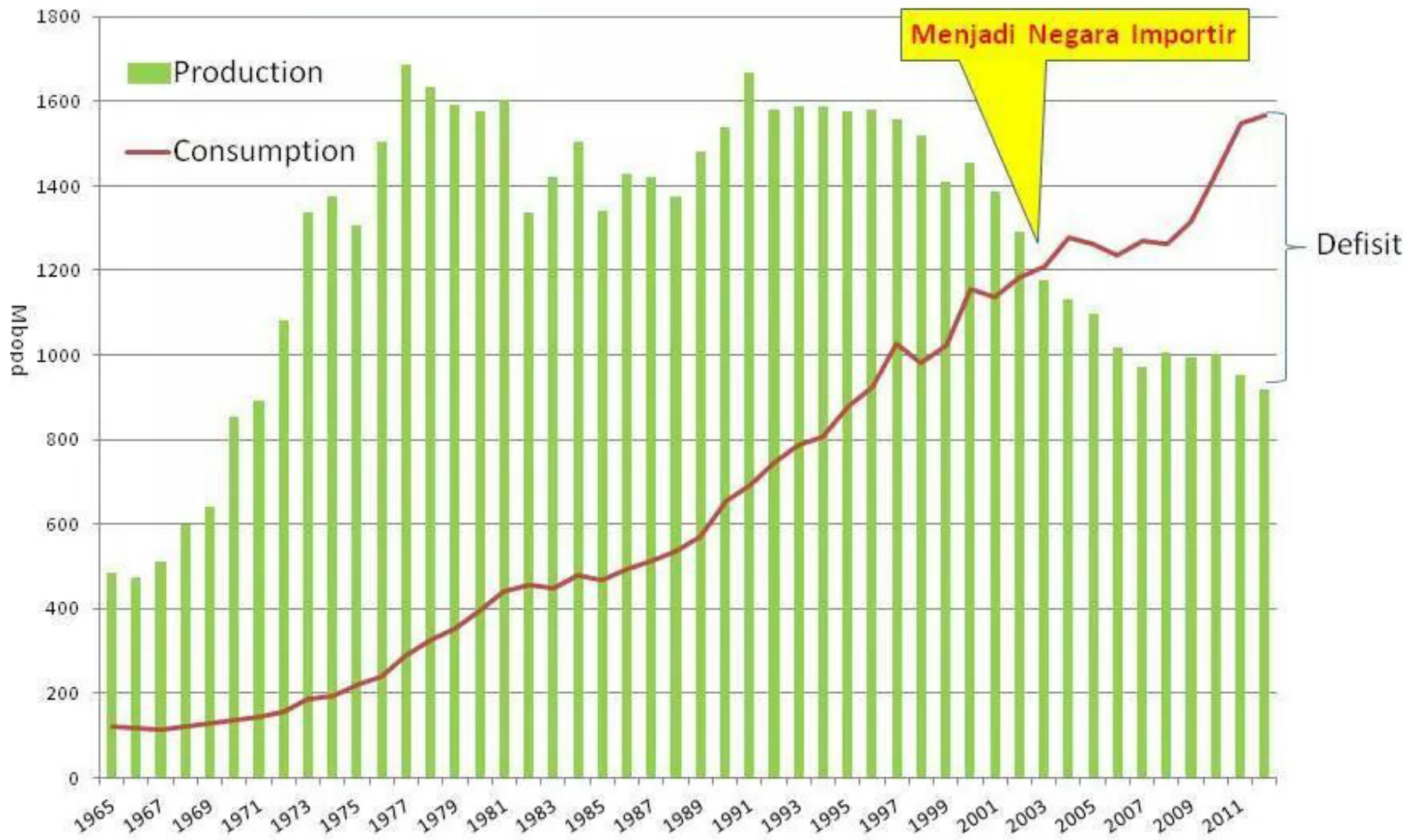
- Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu
- Mendukung pengendalian inflasi
- Mempertahankan daya beli masyarakat
- Meningkatkan produksi pertanian

Perkembangan Subsidi 2015-2019 (triliun Rupiah)





Profil Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia 1965 – 2012



Profil APBD 2020 Provinsi DIY



Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN	4.464.978.099.723,38
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.106.950.081.220,18
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.872.103.160.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	39.906.473.350,01
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	99.880.255.777,75
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	95.060.192.092,42
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.348.394.499.313,20
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	103.244.089.600,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.365.229.514.955,60
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	879.920.894.757,60
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.633.519.190,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	8.853.500.000,00
1.3.2.	DANA DARURAT	0,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00
1.3.4.	DANA PENYESUJAN DAN OTONOMI KHUSUS	0,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	780.019.190,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.464.978.099.723,38
2.	BELANJA	4.771.362.204.048,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.484.714.879.373,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.694.127.503.373,00
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	21.310.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.000.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMDES	758.277.176.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMIDES	0,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.286.647.324.675,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.247.198.387,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.082.576.923.810,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	288.282.500.269,00
2.2.4.	BELANJA BANTUAN KEGIATAN KELEMBAGAAN	750.540.702.209,00
	JUMLAH BELANJA	4.771.362.204.048,00
	SURPLUS/(DEFSIT)	(306.384.104.324,62)
3.	PEMBIAYAAN	306.384.104.324,62
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	544.924.104.324,62
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	540.422.144.024,62
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	4.501.960.300,00
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	544.924.104.324,62

APBD 2019 Kota Jogja



Uraian	Jumlah	% Total
	(jutaan rupiah)	Belanja APBD
Total Pendapatan	1.725.609.408.040	92,97
Pendapatan Asli Daerah	636.084.388.145	34,27
Dana Perimbangan	907.202.077.000	48,88
Pajak Daerah	420.731.500.000	22,67
Retribusi Daerah	33.621.960.412	1,81
Lain-lain Pendapatan	153.142.027.739	8,25
Total Belanja	1.856.017.020.335	100,00
Belanja Tidak Langsung	771.296.856.511	41,56
Belanja pegawai	661.041.083.965	35,62
Hibah	89.293.099.138	4,81
Bantuan sosial	15.498.800.000	0,84
Bantuan keuangan	1.963.873.408	0,11
Belanja tidak terduga	3.500.000.000	0,19
Belanja Langsung	1.084.720.163.824	58,44
Belanja pegawai	151.997.577.805	8,19
Belanja barang & jasa	624.674.618.029	33,66
Belanja modal	308.047.967.990	16,60
Pembiayaan Daerah	130.407.612.295	7,03
SiLPA	155.407.612.295	8,37
Pengeluaran	25.000.000.000	1,35
Defisit	130.407.612.295	7,03

Nomenklatur Belanja dlm APBD



Rezim	Kategori Belanja	
Orde Baru	Rutin	Pembangunan
Reformasi (unified budget?) UU No.17/2003	Aparatur	Publik
Pasca-Reformasi Permendagri No.13/2006	Tidak Langsung	Langsung



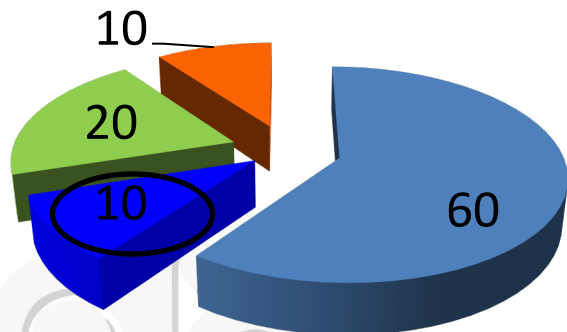
MASALAH UMUM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

1. Kebutuhan anggaran (*fiscal need*) dan kapasitas anggaran (*fiscal capacity*) tidak seimbang
2. Tanggapan negatif atas layanan publik.
Rendahnya ketaatan membayar pajak/retribusi
3. Lemahnya infrastruktur, sarana, dan sumberdaya manusia
4. Berkurangnya subsidi dari pusat
5. Potensi PAD belum mencerminkan kondisi riil.



Fiscal Decentralization

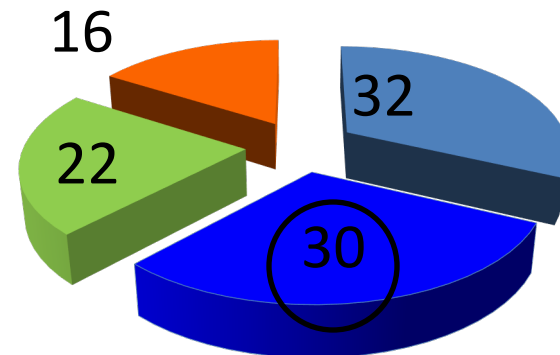
Sekitar 30 persen dari APBN sudah dialihkan dalam bentuk Dana Perimbangan ke APBD



- Central Gov
- Local Gov
- Subsidy
- Interest Payment

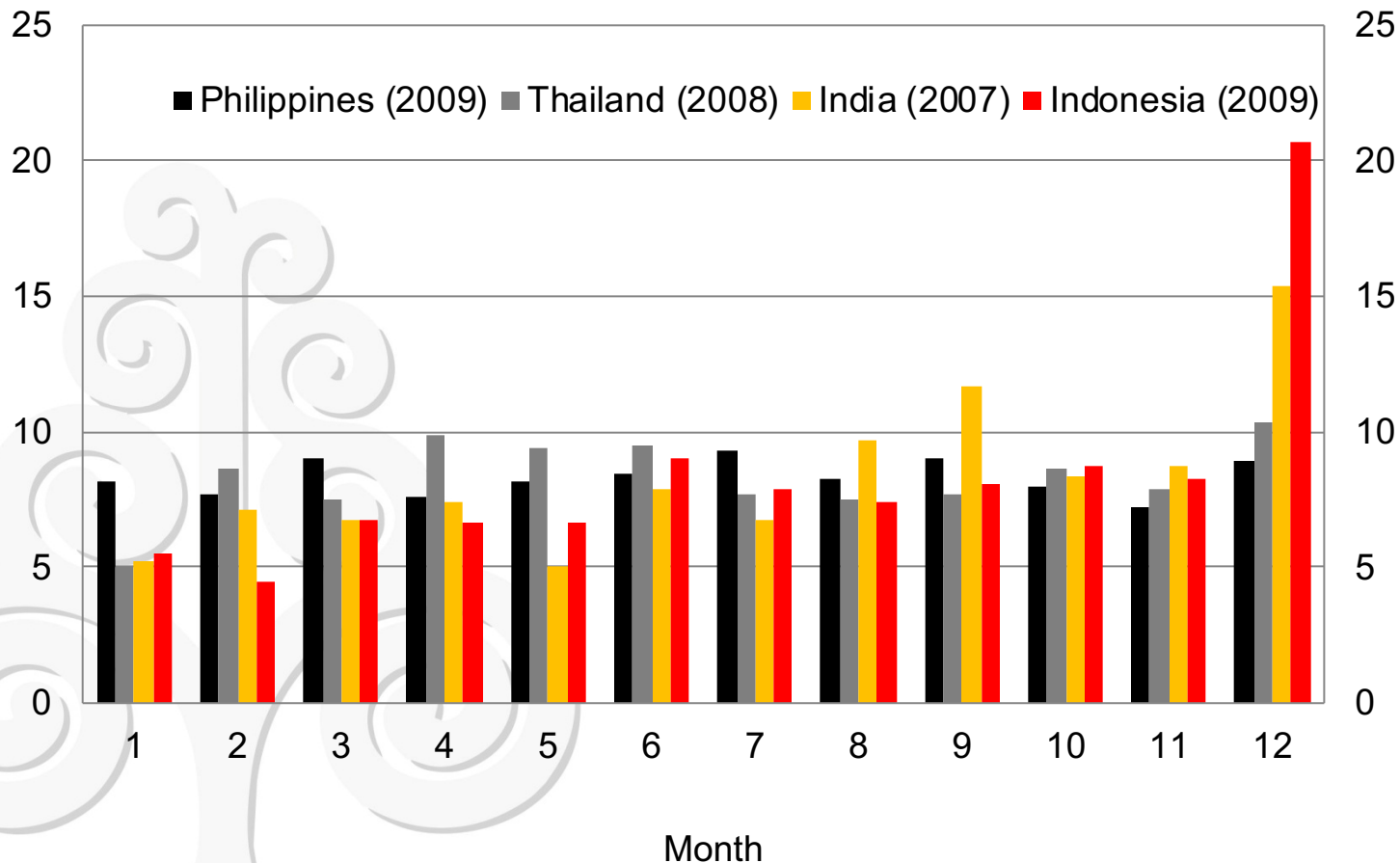
2000

2010



- Central Gov
- Local Gov
- Subsidy
- Interest Payment

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



Source: CEIC, World Bank

Alokasi Belanja di Daerah Kurang Efektif (Contoh kasus di Prov DIY, 2011)



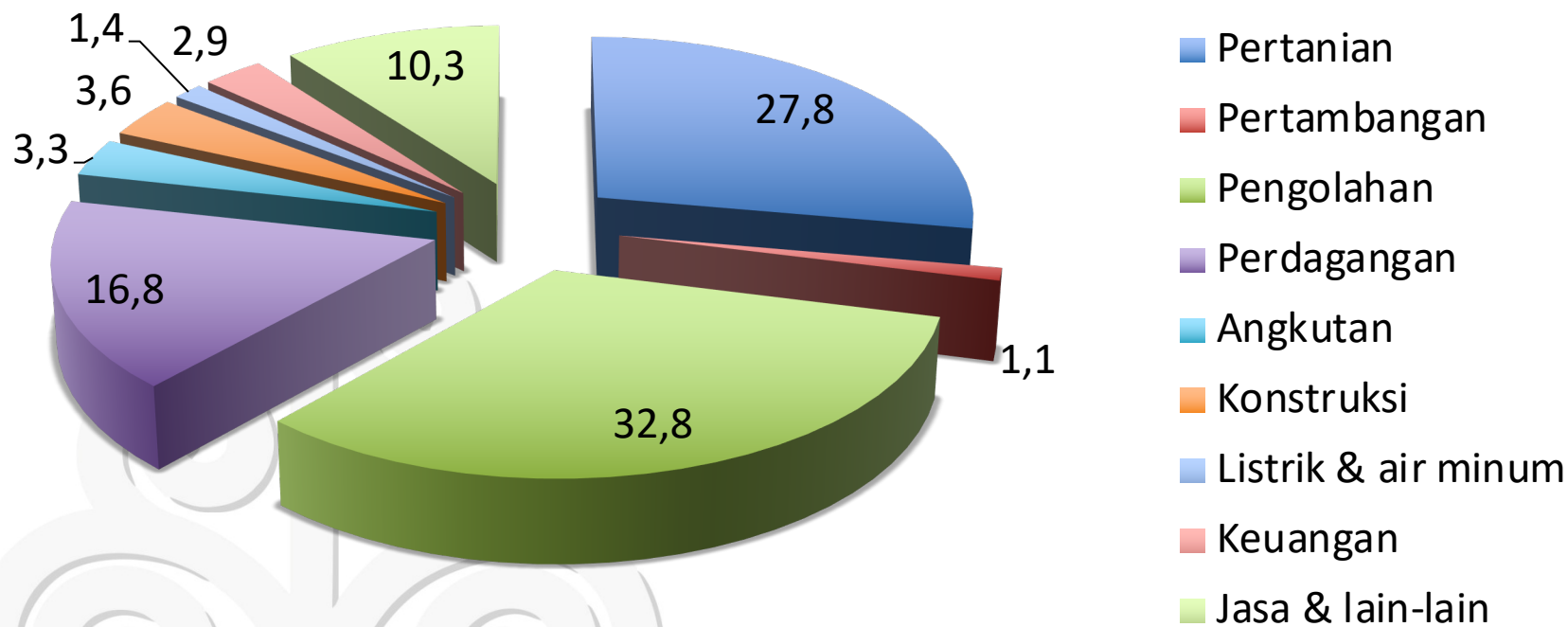
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Monev Pemprov DIY :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?



Penyumbang PDRB Kab Kendal 2012 (%)



Prioritas Belanja APBD 2015 Kab Kendal (Rp juta)



No.	SKPD	Tidak Langsung	Langsung	Total
1	Bupati & Wakil Bupati	1.398.794	-	1.398.794
2	Pendidikan	718.890	100.756	819.646
3	Bina Marga & ESDM	11.516	133.418	144.934
4	RSUD Dr. Soewondo	23.714	116.840	140.554
5	Sekretariat Daerah	18.942	71.241	90.183
6	Cipta Karya & Tata-ruang	7.412	54.740	62.152
7	Kesehatan	7.352	35.755	43.107
8	DPKAD	11.124	23.482	34.606
9	Sekretariat DPRD	3.916	25.347	29.263
10	Tanakhutbun	7.128	19.686	26.814
11	Perindag	9.474	8.097	17.571
12	Ketahanan Pangan	9.514	7.913	17.427
13	Perhubungan	4.696	12.226	16.922
14	Kelautan & Perikanan	3.086	9.455	12.541
15	Bappeda	3.774	7.844	11.618



Masalah Kinerja Keuangan Daerah

- Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
- Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD yg disebabkan oleh:
 - Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
 - Perbedaan output kegiatan;
 - Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
 - Perbedaan *target group*;
 - Perbedaan kebutuhan sumberdaya;
 - Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
- Terjadinya pemborosan anggaran publik.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

THANK YOU

